

Para Srikandi Kabinet Kerja

Bagian Pertama
dari Dua Tulisan

Oleh: Hendra Kurniawan

KABINET Kerja telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Oktober 2014. Sambutan masyarakat cukup beragam, ada yang optimis, namun tak sedikit pula yang ragu akan *track record* dan kinerja para menteri terpilih. Sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi butuh waktu sepekan untuk menentukan para pembantunya ini. Presiden Jokowi tampak cukup selektif dan berhati-hati dengan meminta saran dari KPK dan PPATK untuk mencegah masuknya orang-orang yang kemungkinan terseret kasus korupsi. Tidak hanya terobosan ini yang patut diapresiasi, namun juga soal jumlah keterwakilan perempuan.

Dari 34 menteri yang dilantik tersebut, delapan di antaranya perempuan. Putri-putri terbaik bangsa yang berkesempatan membantu tugas-tugas Presiden Jokowi yaitu Puan Maharani (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Retno Lestari (Menteri Luar Negeri), Nila Djuwita Anfasa Moeloek (Menteri Kesehatan), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Yohana Yambise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Rini M. Soemarno (Menteri BUMN), dan Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan).

Sejak zaman Presiden Soeharto hingga presiden-presiden pasca Reformasi, jumlah perempuan dalam kabinet paling banyak empat orang. Gebrakan ini tentu menorehkan sejarah di Indonesia sebagai kabinet dengan jumlah menteri perempuan

paling banyak.

Dinamika perpolitikan di dunia sejak dulu memang didominasi oleh kaum Adam. Tak salah apabila Suhartono W. Pranoto (2010) menyebut bahwa sejarah cenderung menjadi *androsentric* karena banyak berbicara tentang kekuasaan, pemerintahan, perang, politik, militer, dan sejenisnya yang identik dengan laki-laki. Artinya perempuan dianggap bukan pada tempatnya jika turut berperan dalam pemerintahan. Perempuan menjadi objek dan *second sex*.

Baru sekitar abad 20 muncul gerakan gender yang memperjuangkan kedudukan dan martabat perempuan. Dikotomi antara laki-laki dan perempuan secara tidak sengaja telah membuat subordinasi perempuan oleh laki-laki. Akibat oposisi biner ini laki-laki lebih terekspos di sektor publik, sedangkan perempuan dianggap lebih cocok ada di sektor domestik (di dalam rumah).

Masalah bias gender dalam politik sudah lama menjadi isu global dan terjadi di berbagai negara. Dalam Konferensi Dunia ke-4 tentang wanita tahun 1995 di Beijing, masalah bias gender dalam politik telah mendapat perhatian khusus. Saat itu diusulkan mengenai pemberian kuota 30 persen terhadap perempuan dalam parlemen. Bahkan sekarang ini ada yang menaikkan tuntutan menjadi 50 persen, seimbang dengan



kursi untuk laki-laki di parlemen. Inilah fenomena yang membuktikan betapa sulitnya perempuan menembus panggung politik formal.

Jauh sebelum kolonialisme masuk ke Indonesia, perempuan Jawa menyandang status sebagai *kanca wingking* bagi suaminya. Nasib istri sepenuhnya bergantung pada suami yang sering digambarkan dengan *swarga nunut, neraka katut*. Masuknya kolonialisme Belanda tidak membawa angin segar humanistik bagi kaum perempuan, namun semakin menyeret kaum perempuan pada praktik-praktik yang lebih merendahkan martabat.

Hersri Setiawan dalam *Prisma* tahun 1991 bahkan memberi judul tulisannya yang menggelitik namun sarat makna: *Wanita: Alas Kaki di Siang Hari, Alas Tidur di Waktu Malam*. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai objek merupakan produk dari sistem masyarakat viri sentrisme. Patriarkat berpadu dengan feodalisme semakin memantapkan kaum perempuan sebagai objek atau kepemilikan laki-laki.

Sebenarnya jika ditelusuri lebih lanjut dalam Sejarah Indonesia, peran politik perempuan tidak dapat diabaikan begitu saja. Banyak tokoh perempuan yang turut berperan secara signifikan dalam perjalanan politik di Indonesia. Sebut saja Ratu Sima penguasa Kerajaan Kalingga yang terkenal adil dan tegas, Ratu

Kalinyamat yang pemberani di Kerajaan Demak, hingga R. A. Kartika yang menggelorakan perjuangan emansipasi perempuan. Selain mereka masih banyak pejuang perempuan lainnya seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Martha Christy, Tiahahu, Maria Walanda Maramba Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan lainnya. Mereka semua tidak hanya menjadi pendukung di belak belakang kaum laki-laki dalam meraih kemerdekaan. Mereka merupakan pelopor utama yang juga ambil bagian sebagai penggerak sejarah bangsa.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamarikan, perempuan juga berperan pada masa kemerdekaan misalnya Soerastris Karma Trimurti wartawan tiga zaman yang pernah menjadi Menteri Perburuhan pada masa Orde Lama; Maria Ulfah Soetoso, anggota BPUPKI dan pernah menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Sjahrir; dan lainnya. Sayangnya dalam perjalanan sejarah, peran perempuan dalam politik semakin melemah. Tuduhan keterlibatan Gerwani dalam Peristiwa G30S membuat perempuan di masa-masa selanjutnya menjadi cenderung apolitik. Perempuan kemudian diwadahi dalam organisasi organisasi seperti Dharma Wanita PKK, Dharma Pertiwi, dan lain-lain yang terbentuk karena pengaruh (eksistensi atau kedudukan) suami mereka.

Meski belum mencapai 30 persen seperti yang dijanjikan, namun kaum perempuan dalam kabinet kali ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pembentukan kabinet di Indonesia. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Para Srikandi Kabinet Kerja

Bagian Terakhir
dari Dua Tulisan

Oleh : Hendra Kurniawan

ARTINYA perempuan semakin diakui peranan dan kemampuannya. Perempuan tidak dipandang sebelah mata atau hanya dianggap sebagai objek pelengkap. Kaum feminis selama ini lebih menyenangi istilah perempuan dengan alasan bahwa kata dasar "empu" menunjukkan adanya otoritas (kepemilikan) perempuan terhadap dirinya sendiri. Perempuan merupakan individu yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain (laki-laki). Pengakuan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam politik semakin me-

yakinkan bahwa perempuan seyogyanya mampu mengurangi kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan-keputusan publik.

Koalisi Perempuan Indonesia juga memandang penempatan menteri perempuan dalam kabinet sangat strategis untuk mengurangi bahkan jika mungkin menghapuskan realita kemiskinan yang berwajah perempuan. Misalnya penempatan Yohana Yambise yang berasal dari Papua sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu memberi perubahan signifikan terhadap ke-

sejahteraan perempuan dan anak Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Indonesia Timur. Demikian pula dengan gebrakan dan kinerja Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam waktu seminggu ini cukup meneguhkan kapasitas dirinya.

Terbukanya peluang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam dunia politik terutama pada ranah eksekutif menjadi kesempatan yang baik untuk memberikan pendidikan pada masyarakat agar peduli gender dan

berkeadilan sosial. Kaum perempuan juga perlu semakin meningkatkan kemampuan dan kepercayaan dirinya agar tidak ragu untuk terjun dalam bidang-bidang yang sebelumnya hanya didominasi oleh laki-laki. Ini penting agar jangan sampai masih ada perempuan yang justru secara tidak sadar menomorduakan dan membatasi dirinya sendiri.

Semoga kehadiran para Srikandi dalam Kabinet Kerja ini mampu mewarnai dan semakin menyelaraskan dinamika kerja pemerintah sekaligus meredam situasi politik nasional yang seringkali naik tensinya. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.